

## IMPLEMENTASI STANDAR ISI, STANDAR PROSES, DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SEBAGAI STANDAR MUTU PENDIDIKAN MTs NEGERI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Wahid Khoirul Ikhwan  
Universitas Trunojoyo

### Abstract

Government issued Government Regulation No.19/2005 on National Education Standards. National Education Standards consists of 8 components: (1) Content Standards, (2) Standard Process, (3) Competency Standards, (4) Teachers and Education Personnel Standards, (5) Standards for Infrastructure, (6) Management Standards, (7) Standard Financing, and (8) Educational Assessment Standards.

The results content standards, process standards and competency standards (SKL), MTsN in Tulungagung also meets national standards, so that the quality of education in schools MTsN Tulungagung could be better. It can be seen from the following observations sebyai; standard contents index average of 3.7, the standard index averaged 3.3 and 3.7 index competency standards.

**Keywords:** *Content Standards, Standard Process, Competency Standards*

### PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pendidikan (Guru).

Hal ini sejalan dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai salah satu negara berkembang, pendidikan di Indonesia

terus berbenah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Usaha perbaikan pendidikan di Indonesia merupakan usaha untuk mengubah pandangan negara lain bahwa negara berkembang kurang baiknya manajemen sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan tingkat kecakapan administratif agar mendukung mereka menjadi negara yang maju. Karena itu bisa dikatakan bahwa setiap tujuan negara berkembang memiliki kemiripan, yaitu diantaranya adalah : memenuhi standar minimum pendidikan, kesehatan, perumahan dan makanan bagi masyarakat.

Salah satu pokok masalah yang dihadapi bangsa ini untuk memasuki era globalisasi adalah kondisi Sumber daya manusia (SDM) yang relatif rendah yang dicermati dari pemilikan latar pendidikannya. Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak, terlebih dalam suasana krisis multidimensi yang terjadi saat ini, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas. Untuk itu pendidikan

memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini para peraku pembangunan pendidikan berupaya untuk menaikkan derajat mutu pendidikan Indonesia agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja dengan menyesuaikan pembangunan pendidikan itu sendiri. Menurut Surya (2007: 5), dinyatakan bahwa pendidikan diperlukan untuk meraih kedudukan dan kinerja optimal pada setiap pekerjaan dilakukan. Pendidikan adalah sebuah sistem formal yang mengajarkan tentang pengetahuan, nilai-nilai dan pelbagai keterampilan.

Untuk memperbaiki tingkat dan kompetensi pendidikan di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Pendidikan Nasional terdiri dari 8 komponen yaitu (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Tujuan Standar Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2005:72) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Edward Sallis (2002: 45) menyatakan bahwa peningkatan mutu harus dilaksanakan secara konsisten agar konsumen mendapat jaminan mutu pada prosedur dan produk. Pernyataan ini menegaskan bahwa mutu dan penerapan standar itu melekat pada

proses dan produk. Keterlaksanaan kegiatan sesuai yang memenuhi prosedur dan terwujudnya produk yang memenuhi kriteria harus benar-benar dipahami sebagai prinsip dasar dalam peningkatan mutu pendidikan

Penerapan standar sebagai kondisi yang dinamis. Idealnya target yang ditetapkan makin lama, makin tinggi. Dalam beberapa waktu belakangan ini masalah yang sedang sekolah hadapi makin jelas. Ternyata, menerapkan standar nasional pendidikan di Indonesia bukan perkara mudah. Sebagian sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki keterbatasan pemahaman dan keterampilan menerapkan standar. Dengan bergulirnya kebijakan untuk menerapkan standar mutu sumber daya pendidikan tidak berkembang dengan sendirinya.

Tiap keunggulan yang dicita-citakan perlu didukung dengan keterampilan mengembangkan dokumen perencanaan, data atau bukti pelaksanaan kegiatan sehari-hari, maupun dalam pelaksanaan supervisi yang terintegasi dalam sistem belum tercermin dalam aksi nyata. Penjaminan mutu menjadi isu penting dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah yang perlu didukung dengan struktur informasi yang terkelola baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan perbaikan mutu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis penerapan 3 Standar Pendidikan Nasional, yaitu Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Tulungagung. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kabupaten Tulungagung tersebut adalah MTsN Bandung, MTsN Ngantru, MtsN Pucanglaban, dan MTsN Karangrejo. Dengan analisis ini, mutu pendidikan di keempat MTsN tersebut dapat diketahui

memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah atau belum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa Standar Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 3 dan 4).

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 PP No. 19 Tahun 2007) untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Selain itu standar pendidikan juga berfungsi sebagai pemetaan pendidikan yang bermutu.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. populasi pada penelitian ini adalah MTsN Bandung, MTsN Ngantru, MTsN Pucanglaban, dan MTsN Karangrejo di Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan angket, analisis data.

Teknik analisis data menggunakan editing, Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para responden. Jadi setelah angket dan tes diisi oleh responden dan diserahkan kembali kepada penulis, kemudian penulis memeriksa satu persatu angket

dan tes tersebut. Bila ada jawaban yang diragukan atau tidak dijawab maka penulis menghubungi responden yang bersangkutan untuk menyempurnakan jawabannya. Tujuan editing yang penulis lakukan adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ada pada daftar pertanyaan yang diselesaikan, serta teknik analisis data menggunakan alternatif jawaban dan skoring, Instrumen penelitian disusun berdasarkan 3 Standar yaitu, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan. Instrumen ini terdiri dari 49 butir pernyataan tertutup masing-masing dengan lima opsi jawaban. Jumlah Butir dan Bobot Komponen untuk masing-masing komponen seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.1** Jumlah Butir dan Bobot

Komponen	Nomor Butir	Jumlah Butir
(2)	(3)	(4)
Standar Isi	1 – 17	17
Standar Proses	18 – 29	12
Standar Kompetensi Lulusan	30 – 49	20
Jumlah		49

Instrumen memuat 49 butir pernyataan, masing-masing memiliki bobot butir yang berbeda-beda tergantung dukungannya terhadap pembelajaran bermutu. Bobot butir pernyataan terendah adalah 1, dan bobot butir pernyataan tertinggi adalah 4. Definisi operasional bobot butir adalah:

- Bobot 1 adalah bobot minimal untuk mendukung fungsi butir dalam proses pembelajaran agar dapat berlangsung.
- Bobot 2 adalah bobot yang mendukung fungsi butir tersebut dalam proses pembelajaran yang layak.
- Bobot 3 adalah bobot yang mendukung fungsi butir tersebut dalam proses pembelajaran yang baik.
- Bobot 4 adalah bobot maksimal yang mendukung fungsi butir

tersebut dalam proses pembelajaran yang sangat baik. Seluruh butir pernyataan Instrumen merupakan pernyataan tertutup masing-masing dengan lima opsi jawaban yaitu A, B, C, D, dan E. Ketentuan skor setiap opsi jawaban sebagai berikut.

- a. Butir pernyataan yang dijawab A memperoleh skor = 4.
- b. Butir pernyataan yang dijawab B memperoleh skor = 3
- c. Butir pernyataan yang dijawab C memperoleh skor = 2
- d. Butir pernyataan yang dijawab D memperoleh skor = 1
- e. Butir pernyataan yang dijawab E memperoleh skor = 0.

Sedangkan pemeringkatan instrumen dilakukan jika hasil memenuhi kriteria indeks tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2** Indek dan Kriteria

INDEKS	KRETERIA
3,50 – 4	A (Sangat Baik)
2,50 – 3,49	B (Baik)
1,50 – 2,49	C(Cukup)
0 – 1,49	D(Kurang)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data pada penelitian ini dapat disajikan hasil dan pembahasan berikut ini:

### Implementasi Standar ISI

Dilihat dari standari isi, MTsN di Kabupaten Tulungagung telah memperoleh sosialisasi menyusun, dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sosialisasi KTSP diperoleh baik dari dinas pendidikan maupun Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Dalam menyusun KTSP, sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Namun demikian, berkaitan dengan pedoman penyusunan masih ada sekolah yang belum tahu pedoman dalam menyusun

KTSP. Hal ini terlihat dari jawaban sekolah terhadap pertanyaan apa pedoman yang digunakan dalam menyusun KTSP adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejumlah aspek pendidikan telah dilaksanakan MTsN di Kabupaten Tulungagung sebagaimana terlihat dalam muatan yang telah dilakukan pada pelaksanaan KTSP. Meskipun terdapat variasi jumlah muatan yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sekolah yang telah melaksanakan 8, 9 atau 11 muatan. Berbagai macam muatan yang telah dilaksanakan seperti mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan/ kelulusan, ketuntasan life skills, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal atau berwawasan global. Gambaran ini memperlihatkan penyelenggaraan pendidikan bukan hanya substansi mata pelajaran tetapi juga telah melingkupi pengembangan diri, bahkan hingga pengembangan wawasan pendidikan mulai dari keunggulan lokal hingga wawasan global. Kondisi ini tentu saja cukup menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan. Berikut hasil analisis berdasarkan observasi pada tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3** Implementasi Standar Isi

Nama Sekolah	Indek Rata-Rata
MTsN Pucanglaban	3,6
MTsN Karangrejo	3,6
MTsN Ngantru	3,8
MTsN Bandung	3,8
<b>Jumlah Index Rata-rata</b>	<b>3,7</b>

Berdasarkan tabel di atas, ketercapaian standar isi di MTsN Bandung, MTsN Ngantru, MTsN Pucanglaban, dan MTsN Karangrejo rata-rata indeks 3,7. Indeks 3,7 dikategorikan A (sangat baik), sehingga kualitas implementasi standar isi di MTsN Bandung, MTsN Ngantru, MTsN

Pucanglaban, dan MTsN Karangrejo baik dari rata-rata keseluruhan. Akan tetapi perlu diupayakan terutama dalam hal guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi yang diberikan kepada siswa maksimal 50% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.

### Implementasi Standar Proses

Gambaran proses pembelajaran di MTsN Bandung, MTsN Ngantru, MTsN Pucanglaban, dan MTsN Karangrejo juga tampak telah memadai. 90 hingga 100 persen mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sudah memiliki Rencana Pelaksanaan Pelajaran (RPP). Namun demikian, pedoman yang digunakan dalam menyusun RPP berbeda-beda. Terdapat sekolah yang menggunakan silabus mata pelajaran sebagai dasar penyusunan RPP. Namun ada pula, sekolah yang menggunakan Pennendinas No 41 tentang standar proses dalam menyusun RPP.

Selain telah menyusun RPP dalam pembelajarannya, kepala SMP peserta Program SSN telah melakukan pemantauan pada masing-masing tahapan pembelajaran. Pada tahap perencanaan pembelajaran, kepala sekolah melakukan supervise administrasi atau perangkat pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, kepala sekolah mengaku melihat kesesuaian antara perangkat atau administrasi pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajarannya atau melakukan supervise akademik. Terakhir, pada tahap penilaian, kepala sekolah melihat tahap-tahap penilaian yang dilakukan oleh guru. Tahapan penilaian ini dapat dilihat melalui supervisi administrasi. Dalam melakukan supervisi, terdapat kepala sekolah membuat catatan terhadap

temuan-temuan terhadap pemantauan pembelajaran.

Selain pemantauan, kepala sekolah juga melakukan evaluasi terhadap masing-masing tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Pada tahap perencanaan, kepala sekolah menilai kesesuaian antara keterampilan dasar (KD) dengan indikator. ) Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah menilai ketercapaian antara KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Pada tahap penilaian, kepala sekolah menilai kesesuaian instrumen penilaian yang digunakan. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, sebagian kepala sekolah juga memberikan tindak lanjut hasil temuannya dengan cara memberikan arahan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Sebagai akuntabilitas sekolah, kepala sekolah juga menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan seperti komite sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Berikut hasil analisis berdasarkan observasi pada tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4** Implementasi Standar Proses

Nama Sekolah	Indek Rata-Rata
MTsN Pucanglaban	3,5
MTsN Karangrejo	3,25
MTsN Ngantru	3,2
MTsN Bandung	3,3
<b>Jumlah Index Rata-rata</b>	<b>3,33</b>

Berdasarkan tabel di atas, ketercapaian standar isi di MTsN Bandung, MTsN Ngantru, MTsN Pucanglaban, dan MTsN Karangrejo rata-rata indeks 3,3. Indeks 3,3 dikategorikan B (Baik), sehingga kualitas implementasi standar isi di MTsN Bandung, MTsN Ngantru, MTsN Pucanglaban, dan MTsN Karangrejo baik dari rata-rata keseluruhan. Akan tetapi perlu diupayakan terutama dalam hal supervise kepala sekolah kepada guru yang berkaitan dengan proses

pembelajaran, kedisiplinan, dan hasil pembelajaran.

### Implementasi Standar Kompetensi Lulusan

Dilihat dari standar kompetensi lulusan (SKL), MTsN di Kabuapten Tulungagung juga telah memperlihatkan mutu sekolah yang baik. Hal ini tampak dari persen kelulusan setiap tahunnya, dan prestasi baik akademik maupun non akademik. Persentase kelulusan di sekolah peserta Program SSN pada umurnya 100 persen setiap tahunnya. Sementara untuk prestasi akademiknya, MTsN di Kabupaten Tulungagung pada umumnya memiliki banyak prestasi seperti juara olimpiade matematika, olimpiade fisika, lomba bahasa Inggris. Juara yang diperoleh meliputi juara propinsi dan nasional. Selanjutnya, prestasi non akademik meliputi juara olah raga, kegiatan kepemudaan, dan seni daerah. Olah raga meliputi catur, dan seni bela diri seperti taekwondo, karate. Seni daerah meliputi randai yang merupakan seni daerah dari Sumatera Barat. Terakhir, kegiatan kepemudaan adalah kegiatan pramuka. Berikut hasil analisis berdasarkan observasi tabel 1.5 berikut.

**Tabel 1.5** Implementasi Standar Lulusan

Nama Sekolah	Indek Rata-Rata
MTsN Pucanglaban	3,65
MTsN Karangrejo	3,6
MTsN Ngantru	3,75
MTsN Bandung	3,7
<b>Jumlah Index Rata-rata</b>	<b>3,7</b>

Berdasarkan tabel di atas, ketercapaian standar kompetensi lulusan di MTsN Bandung, MTsN Ngantru, MTsN Pucanglaban, dan MTsN Karangrejo rata-rata indeks 3,7. Indeks 3,7 dikategorikan A (sangat baik), sehingga kualitas implementasi standar isi di MTsN Bandung, MTsN Ngantru, MTsN Pucanglaban, dan MTsN Karangrejo baik dari rata-rata keseluruhan. Akan tetapi, perlu

diupayakan terutama dalam hal siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.

### KESIMPULAN

Dilihat dari standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan (SKL), MTsN di Kabuapten Tulungagung juga telah memenuhi standar pendidika nasional, sehingga mutu pendidikan MTsN sekolah di Kabupaten Tulungagung dapat dikresteriakan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil observasi sebyai berikut; standar isi indeks rata-rata 3,7, standar proses indeks rata-ratanya 3,3, dan indeks standar kompetensi lulusan 3,7.

Tetapi, ada beberapa catatan bahwa ada beberapa item butir di standar proses yang memiliki indek 2 di antaranya; Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah mencakup tiga tahapan yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penilaian hasil pembelajaran, dan kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.

### SARAN

Berdasarkan simpulan di atas memperlihatkan bahwa MTsN di Kabuapten Tulungagung tampak relatif telah baik kecuali satu hal, yakni target sasaran. Prosil MTsN di Kabuapten Tulungagung memperlihatkan bahwa standar pendidikan nasional telah terpenuhi. Untuk lebih memantapkan standar nasional pendidikan, sebaiknya sekolah mengintenfikan program yang

memperoleh nilai indeks yang masih kurang, di antaranya: kepala sekolah harus menjalankan leader di sekolah dengan rutin melakukan supervise terhadap guru.

#### DAFTAR PUSTAKA

Surya, Aldwin 2006, *Perubahan Sosial Masyarakat Kota Metropolitan*, Medan:Kopertis Wilayah I NAD-SUMUT.

Depdiknas.2005. *Renstra Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas.

Mordiyanto.2001.*Strategi Pelaksanaan Penjamin Sistem Mutu Pendidikan (SPPMP) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota*.

Edward Sallis. 2002. *Total Quality Management in Education, Third Edition*, Taylor & Francis e-Library.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas.

Direktorat *Pembinaan Sekolah Menengah Pertama*. 2008. *Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP Standar Nasional*. Jakarta: Dit. PSMP.

Ditjen Mandikdasmen. 2005. *Panduan Umum: Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Ditjen Mandikdasmen.

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Satu Naskah.

Sekretaris Negara. 2005. *Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Jakarta: Sekretaris Negara.

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitiandan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sina Baru

Resito, Herman.1992. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.